

BAB IV

KESIMPULAN

Paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo telah diterbitkan hingga jilid XVI sampai pada tahun 2017. Kebijakan- kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi tersebut dirancang untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan investasi asing di Indonesia. Melalui paket-paket kebijakan ekonomi tersebut, prosedur investasi di Indonesia telah dipermudah. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia adalah pendirian *one-stop service* yang mengurus prosedur investasi. Proses perizinan yang sebelumnya harus dilakukan melalui 22 kementerian dan lembaga pemerintah, telah diintegrasikan menjadi satu badan yang dinaungi oleh BKPM. Sebanyak 167 surat izin didelegasikan kepada BKPM dalam proses perizinan berbagai sektor, termasuk sektor energi, industri, dan pariwisata. Perubahan-perubahan tersebut juga memangkas waktu yang dibutuhkan untuk prosedur perizinan secara signifikan. Ditambah lagi, pemangkasan proses perizinan investasi juga akan meningkatkan tingkat transparansi di Indonesia dan mengurangi tingkat korupsi karena mempersulit aparat pemerintah yang berniat melakukan korupsi.

Perusahaan-perusahaan asing juga menyadari perubahan yang drastis dalam proses birokrasi Indonesia apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum diluncurkannya paket-paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan tingkat arus masuk FDI Indonesia pada kuartal kedua tahun 2017 yaitu sebesar Rp 109,9 triliun dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang hanya mencapai Rp 99,4 triliun. Sementara tingkat realisasi investasi dalam kuartal kedua tahun 2017 tercatat senilai Rp 170,9 triliun, yang menunjukkan kenaikan sekitar 3,1% dari Rp 165,8 triliun pada kuartal pertama, dan kenaikan sekitar 12,7% dari kuartal kedua tahun 2016. Selain itu, *World Bank* juga melaporkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan terhadap tingkat EoDB dan termasuk dalam salah satu daftar *Top Performer* berdasarkan kemajuan dan peningkatan yang dialami, walaupun masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lain seperti Singapura.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XVI, kecuali Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, memiliki relevansi yang jelas dalam mempermudah akses FDI ke Indonesia. Relevansi tersebut dapat dilihat dari keterkaitan antara kebijakan-kebijakan dalam masing-masing Paket Kebijakan Ekonomi dengan determinan dan/atau hambatan FDI Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi jilid I-XVI meningkatkan kondisi determinan FDI di Indonesia dan mengurangi hambatan FDI di Indonesia. Rangkuman dari analisis relevansi setiap jilid paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tanda titik (•) di tabel merepresentasikan elemen yang memiliki relevansi terhadap kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang terkait.

Tabel 4.1 Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Determinan FDI Indonesia

Paket Kebijakan Ekonomi	Determinan FDI Indonesia			
	Keadaan Perekonomian	Kebijakan Pemerintah	SDA & SDM	Infrastruktur
Jilid I	•	•		•
Jilid II		•		
Jilid III	•	•		
Jilid IV	•			
Jilid V		•		
Jilid VI		•		
Jilid VII	•	•		
Jilid VIII		•		•
Jilid IX		•		•
Jilid X		•		
Jilid XI	•	•		•
Jilid XII	•	•		
Jilid XIII				
Jilid XIV	•		•	•
Jilid XV		•		•
Jilid XVI		•		

Sumber: Olahan mandiri

**Tabel 4.2 Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Hambatan
FDI Indonesia**

Paket Kebijakan Ekonomi	Hambatan FDI Indonesia				
	Korupsi	Birokrasi yang tidak efisien	Akses pembiayaan investasi	Risiko Politik	<i>Ease of Doing Business</i>
Jilid I		•			•
Jilid II		•			•
Jilid III		•			•
Jilid IV					•
Jilid V					•
Jilid VI	•	•			•
Jilid VII		•			•
Jilid VIII		•			
Jilid IX					•
Jilid X					
Jilid XI			•		•
Jilid XII	•	•			•
Jilid XIII					
Jilid XIV					•
Jilid XV					
Jilid XVI	•	•			•

Sumber: Olahan mandiri

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa determinan yang menjadi fokus pemerintah adalah mengenai peningkatan kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses FDI di Indonesia. Aspek kebijakan pemerintah yang relevan dalam Paket Kebijakan Ekonomi tersebut terkait insentif, fasilitas, debirokratisasi, dan deregulasi investasi asing di Indonesia. Sementara determinan ‘SDA dan SDM’ hanya relevan dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV, dengan meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam *e-commerce*. Terkait lima hambatan terbesar FDI, tidak ada Paket Kebijakan Ekonomi yang relevan terhadap risiko politik Indonesia. Masalah sulitnya akses pembiayaan investasi di Indonesia juga hanya ditingkatkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X dan XV tidak relevan dalam mempermudah hambatan masuknya FDI ke Indonesia, namun memiliki relevansi dengan determinan FDI Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi terutama relevan dengan hambatan berupa peningkatan EODB dan meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia. Walaupun tingkat korupsi di Indonesia hanya relevan secara langsung dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI, XII, dan XVI, namun dengan meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia tingkat korupsi di Indonesia juga dapat berkurang. Dengan dilakukannya deregulasi dan debirokratisasi, maka akan mengurangi kesempatan bagi aparat pemerintah untuk melakukan praktik KKN.

Indonesia seringkali dideskripsikan sebagai “*a gold mine in a minefield*” oleh pihak investor asing. Indonesia memiliki potensi yang besar namun sekaligus merupakan lokasi yang sulit bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis. Dengan berbagai kebijakan yang dimuat dalam paket kebijakan ekonomi, kondisi

tersebut sudah mengalami kemajuan, namun tentunya iklim bisnis Indonesia tidak dapat diubah hanya dalam waktu singkat. Pada kenyataannya, butuh waktu yang lama untuk mengubah sistem regulasi dan birokrasi Indonesia secara total mengingat sejarah kondisi pemerintahan Indonesia yang korup sejak era Orde Baru. Presiden Joko Widodo tengah mengalami tekanan dari berbagai pihak yang mengharapkan hasil yang instan dan signifikan dalam periode kepemimpinannya. Namun, paket-paket kebijakan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membuka perekonomian Indonesia terhadap kesempatan bagi investasi asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan kontribusi investasi asing untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Foreign Direct Investment.” *China Daily*, 17 Oktober 2006.
http://www.chinadaily.com.cn/business/2006-10/17/content_710167.htm
- “Indonesia Investment, Trade Strategy, and Agreements Handbook.”
International Business Publications USA (2016).
- “Jokowi Wants Indonesia’s Investment Rank Above 40,” *Tempo*, 23 Januari 2016.
<https://en.tempo.co/read/news/2016/01/23/056738748/Jokowi-Wants-Indonesias-Investment-Rank-Above-40>
- “Policy Reforms to make business easy and boost growth.” *Jakarta Post*, 30 Aug 2017. <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/08/30/policy-reforms-to-make-business-easy-and-boost-growth.html>
- ”Fitch: Investors Upbeat on Indonesia but Point to Political Risk.” *Reuters*, 2017.
<https://www.reuters.com/article/fitch-investors-upbeat-on-indonesia-but-idUSFit994645>
- Adzkie, Aghnia dan Resty Armenia. “Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I.” *CNN Indonesia*, 9 Sep 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150909182130-92-77720/presiden-jokowi-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i>
- Alfaro, Laura, et al. “How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?” *JEL Classifications* (2006).

Aliya, Angga. "Perjalanan Dolar AS dari Rp 2.000 Kini Rp 13.000." *Detik Finance*, 16 Juni 2015. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2943614/perjalanan-dolar-as-dari-rp-2000-kini-rp-13300>

Amianti, Grace dan Marchio Irfan Gorbiano, "Indonesia Jumps 19 Places in EODB 2018." *Jakarta Post*, 1 November 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/01/indonesia-jumps-19-places-in-eodb-2018-wb.html>

Aprilia, Dini. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI." *CNN Indonesia*, 31 Agustus 2017. <http://cnnindonesia.com/tv/20170831170057-402-238715/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xvi>

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ariyanti, Fiki. "Ini Rasio Utang Pemerintah RI." *Liputan6.com*, 13 Feb 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2854387/ini-rasio-utang-pemerintah-ri-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>

Ariyanti, Fikri. "3 Tahun Jokowi-JK, RI Raup Investasi Hampir Rp 1.500 Triliun." *Liputan6.com*, 17 Okt 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3131490/3-tahun-jokowi-jk-ri-raup-investasi-hampir-rp-1500-triliun>

Ayikut, Dick & Dillip, Ratha. "South-South FDI Flows: How Big Are They?" *Transnational Corporations* 13 No. 1 (2003).

Bank Indonesia. "Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan."

<https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>

Bappenas. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2."

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-2/>

Bappenas, "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4."

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-4/>

Bappenas. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1."

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-1/>

Bappenas. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10."

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-x-memperlonggar-investasi-sekaligus-meningkatkan-perlindungan-bagi-umkm/>

Bappenas. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 11."

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-x-meningkatkan-daya-saing-nasional-dalam-pertarungan-ekonomi-global/>

Bappenas. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 12."

<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii->

pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 13.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-rumah-murah-untuk-rakyat/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-3/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 5.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-5/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 6.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-6/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 7.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-7>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 8.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-viii-satu-peta-nasional-kilang-minyak-dan-bea-masuk-suku-cadang-pesawat/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 9.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-ekonomi-ix-pemerataan-infrastruktur-ketenagalistrikan-dan-stabilisasi-harga-daging-hingga-ke-desa/>

Bappenas. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-1/>

Ben, Bland. “Chinese Investors Hesitate over Indonesia Investment.” *FT.com*, 15 Juni 2017.

Ben, Li. “Alternation of legislation of foreign investment in China.” *International Journal of Law and Management* 51, No. 4 (2009).

BKPM. “Daftar Negatif Investasi.” <https://www.bkpm.go.id/id/prosedur-investasi/daftar-negatif-investasi>

BNSP. “Tentang BNSP.” <https://bnspp.go.id/informasi/102/TENTANG-BNSP->

Callaghan dan Vivoda. “Problems of Regulatory Governance in Mining Sector in Asia.” *Transnational Corporations* Vol. 22 No. 1 (2015).
https://www.researchgate.net/publication/305288724_Problems_of_regulatory_governance_in_the_mining_sector_in_Asia

Deny, Septian. “DKI Jakarta Tetapkan UMP 2017 Sebesar Rp 3,35 Juta.” *Liputan6.com*, 28 Okt 2016.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2637688/dki-jakarta-tetapkan-ump-2017-sebesar-rp-335-juta>

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. “Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.” <http://kek.go.id>

Dunning, John H. “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future.” *International Journal of the Economics of Business* 8, No. 2 (2001).

Dutu, Richard. “Making the Most of Natural Resources in Indonesia.” *OECD Economics Department Working Paper* No. 1236. OECD Publishing Paris.
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js0cqqk42ls-en.pdf?expires=1530195454&id=id&accname=guest&checksum=236DFC2E83D2C5DADBF3847BB517E34F>

Froot, Kenneth A. “Introduction to Foreign Direct Investment.” *Foreign Direct Investment*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

GAN Integrity. “Indonesia Corruption Report.” <https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/indonesia/>

Gopalan, Sasidaran, Rabin Hattari, dan Ramkishen S. Rajan. “Understanding FDI in Indonesia.” *Journal of International Trade Law and Policy* 15, No. 1 (2016).

Haendel, Dan. *Foreign Investments: The Management of Political Risk*. Westview Press, 1979.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.

Hanafi, Muhammad Fadli dan Berly Martawardaya. "Natural Resources, from Curse to Blessing." *Jakarta Post*, 12 Oktober 2015.
<http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/12/natural-resources-from-curse-blessing.html>

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4." https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-paket.1751.html#.Wzj_M2AzbiU

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Paket Kebijakan Ekonomi VI." <https://ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-vi.1799.html#.WzkBOWAzbiU>

ILO. *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017*. Jakarta: ILO Publications, 2017.
http://www.oit.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_613626.pdf

IMF. *Balance of Payments Manual*.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf>.

Indonesia Investments. “Infrastruktur di Indonesia.” <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381?>

Indonesia Investments. “Corruption in Indonesia.” <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/corruption/item235?>

Indonesia Investments. “Ekonomi Indonesia.” <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>

Indonesia Investments. “Inflasi di Indonesia.” <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254?>

Indonesia Investments. “Infrastructure Competitiveness Indonesia: Reasons for Optimism?” <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/infrastructure-competitiveness-indonesia-reason-for-optimism/item8240>

Indonesia Investments. “Business Environment in Indonesia Needs Political Stability.” <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/business-environment-in-indonesia-needs-political-stability/item7367?>

Indonesia Investments. “Current Account Balance.” <https://www.indonesia-investments.com/id/finance/macroeconomic-indicators/current-account-balance/item6037>

Indonesia Investments. "Produk Domestik Bruto Indonesia."

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>

Ismail, Mohammad Sani. "Summary of Indonesia's Finance Sector Assessment."

ADB Papers on Indonesia No 12 (Desember 2015).

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178045/ino-paper-12-2015.pdf>

Kemenkeu. "Pemerintah Kenalkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 15."

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-perkenalkan-paket-ekonomi-jilid-15/>

Kemenko PMK. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII."

<https://www.kemenkopmk.go.id/galeri/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-viii>

Kominfo. *Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II.*

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/6101/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-ii/0/berita>

KPMG. *Finance in Indonesia: Set for A New Path?*

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/id/pdf/2017/09/id-finance-in-indonesia-set-for-a-new-path.pdf>

KPMG. *Investing in Indonesia.* 2015.

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/id-ksa-investing-in-indonesia-2015.pdf>

KPPBC TMP Tanjung Emas. "Dwelling Time."

<http://bctemas.beacukai.go.id/dwelling-time/>

Kurniati, Yati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri. "Determinan FDI." *Working Paper* No. 6 (2007). https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/Pages/WP_06_2007.aspx.

Licnachan, Gerald. "Indonesia's Revised Negative Investment List." *ReedSmith*, Juni 2016. <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2016/06/indonesias-revised-negative-investment-list>

Lindblad, J.Thomas. "Foreign Direct Investment in Indonesia: Fifty Years of Discourse." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51 (2015).

Loungani, Prakash dan Assaf Razin. "How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?" *Finance and Development* 38, No. 2 (2001). <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm>

Mangkusubroto, Guritno dan Algifari. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN, 1998.

Mills, Karen. "Indonesia's Ongoing Deregulation of Direct Foreign Investment." *East Asian Executive Reports* 18, No.1 (1996).

Moosa, Imad A. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*. New York: Palgrave, 2002.

Nizar, Muhammad Afdi. “Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6 No. 2 (2012).

[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/dampak%20fluktuasi%20h
arga%20minyak%20dunia.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/dampak%20fluktuasi%20harga%20minyak%20dunia.pdf)

OECD. “OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.”

OECD. “FDI Restrictiveness.” [https://data.oecd.org/fdi/fdi-
restrictiveness.htm#indicator-chart](https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm#indicator-chart)

OECD. “Survei Ekonomi OECD Indonesia.” <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>.

OECD. *Indonesia Policy Brief 2016*. OECD Publishing, 2016. [http://www.oecd.org/indonesia/indonesia-improving-investment-
climate.pdf](http://www.oecd.org/indonesia/indonesia-improving-investment-climate.pdf)

Praditya, Ilyas Istianur. “Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 soal E-Commerce.” *Liputan6.com*.

[https://www.liputan6.com/bisnis/read/2648931/ini-isi-lengkap-paket-
kebijakan-ekonomi-jilid-14-soal-e-commerce](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2648931/ini-isi-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-14-soal-e-commerce)

Praditya, Ilyas Istianur. “Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV.” *Liputan6.com*. [https://www.liputan6.com/bisnis/read/2992225/ini-isi-
paket-kebijakan-ekonomi-jilid-15](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2992225/ini-isi-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-15)

PWC. *Indonesian Infrastructure: Stable Foundation for Growth.*

<https://www.pwc.com/id/en/cpi/asset/indonesian-infrastructure-stable-foundations-for-growth.pdf>

Rajenthran, Arumugam. "Indonesia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct Investment." *ISEAS Working Papers* (2002).

Razin, Assaf, dan Efraim Sadka. *Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows*. (Oxford: Princeton University Press, 2007).

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt7spnv>.

Salna, Karlis dan Haslinda Amin. "Jokowi Says His Reforms are A Success with Growth Above 5%." *Bloomberg*, 6 Des 2017.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-06/jokowi-says-his-reforms-are-a-success-with-growth-back-above-5>

Salna, Karlis. "Indonesia Seeks Growth Boost to Meet 7% Target, Indrawati Says." *Bloomberg*, 7 April 2017.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-07/indonesia-seeks-growth-boost-to-meet-7-target-indrawati-says>.

Setiawan, Sakina. "Paket Kebijakan Ekonomi Lengkap, tetapi Minim Implementasi." *Kompas*, 20 Desember 2016.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/181701126/paket.kebijakan.ekonomi.lengkap.tetapi.minim.implementasi>

- Stefanie, Christie. "Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 Atur Roadmap E-Commerce." *CNN Indonesia*, 10 Nov 2016. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161110181905-185-171846/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-14-atur-roadmap-e-commerce>
- Stoian, Carmen R. dan Fragkiskos Filippaios. "Dunning's Eclectic Paradigm: A Holistic, Yet Context Specific Framework for Analysing the Determinants of outward FDI." *International Business Review* 17, No. 3 (2008). <https://kar.kent.ac.uk/9871/1/IBRRevisedLast.pdf>
- Sugianto, Danang. "Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid ke-16." *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>
- Sukmana, Yoga. "Diseimbangi S&P, Pemerintah Jelaskan Utang Rp 3.459 Triliun." *Kompas.com*, 24 Maret 2017, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/24/192657826/disambangi.s.p.pemerintah.jelaskan.utang.rp.3.549.triliun>.
- Tan, Bee Wah dan Chor Foon Tang. "Examining the Causal Linkages among Domestic Investment, FDI, Trade, Interest Rate and Economic Growth in ASEAN-5 Countries." *International Journal of Economics and Financial Issues* (2016).

The International Trade Administration. "Indonesia Openness to and Restriction on Foreign Investment." <https://www.export.gov/apex/article2?id=Indonesia-openness-to-foreign-investment>

Tiwari, Aviral dan Mihai Mutascu. "Economic Growth and FDI in Asia: A Panel Data Approach." *MPRA Archive*, 28172 (2010).

Tsikata, G. Kwaku, Yaw Asante, dan E. M. Gyasi. *Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana*. London: Overseas Development Institute, 2000. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8125.pdf>

UNCTAD. *World Investment Report 2013*. Geneva: United Nations Publications, 2013.

UNCTAD. *World Investment Report 2017*. Geneva: United Nations Publications, 2017. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

UNDP. "Indonesia's Human Development Index Rises, but Inequality Remains." <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>

Velde, Dirk Willem te. "Government Policies Towards Inward Foreign Direct Investment in Developing Countries: Implications for human capital formation and income inequality." *OECD Development Center* (2001).

Widyawan, et al. "Legal Guide to Investment in Indonesia." *Allens*, Juli 2014.

<https://www.allens.com.au/pubs/pdf/Investing-in-Indonesia.pdf>

Wirawan, Jerome. "Perampingan jumlah PNS Menuai Polemik." *BBC*, 16 Juni 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160607_indonesia_perampingan_pns

Yahsyi, Asfahan. "Memanfaatkan Tax Holiday dan Tax Allowance." *CNN*, 25

Februari 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180225091046-82-278643/memanfaatkan-tax-holiday-dan-tax-allowance>